

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dapat digolongkan sebagai masalah utama yang umumnya ada di setiap negara di dunia. Korupsi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sama dengan pencurian yang mengundang nafsu setiap pemangku kepentingan untuk melakukannya. Saat ini korupsi dapat terjadi baik di sektor publik maupun sektor privat dan tidak mengenal siapa, bagaimana, dimana, dan kapan terjadinya. Korupsi dapat terjadi secara individu maupun berkelompok dan merugikan negara dari jumlah kecil hingga jumlah triliunan rupiah yang lambat laun akan membuat suatu negara hancur dalam kemiskinan.

Definisi korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara(perusahaan atau sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 korupsi dirumuskan dalam tujuh jenis tindakan yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Korupsi telah digolongkan dalam tindak pidana yang perbuatannya termasuk melawan hukum.

Awal mula perkembangan korupsi di Indonesia adalah adanya nasionalisasi perusahaan Belanda dan asing pada tahun 1958. Pada masa itu, Pertamina merupakan lahan korupsi paling subur hingga saat ini membuat Indonesia masuk dalam peringkat negara terkorup di dunia. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi

yang artinya pemerintahan oleh para pencuri, dimana para pejabat pemerintah pura-pura bertindak jujur dalam menjalankan tugas.

Tahun 2019 merupakan tahun terburuk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena lembaga independen KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) dilemahkan langsung oleh pemerintah legislatif dan eksekutif. Diikuti dengan kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar yaitu kasus korupsi perusahaan asuransi jiwa swasta yang merugikan negara sebesar 13,7 Triliyun Rupiah. Anggota legislatif dan polisi merupakan profesi terbanyak yang terjerat kasus korupsi.

Semakin maraknya kasus korupsi mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Berbagai program dan strategi dilakukan demi menekan angka korupsi di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pembenahan secara intens khususnya dalam sistem tata kelola partai politik melalui lembaga pencegahan korupsi diantaranya; Tim Tastipikor(Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, kejaksaan, BPK(Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPKP(Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).

BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN(Kolusi Korupsi Nepotisme) serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengawasan. Untuk mendukung tugas dibidang pengawasan, BPKP menciptakan suatu program yaitu IEPK(Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi). IEPK adalah sebuah kerangka

pengukuran yang terdiri dari indikator-indikator penilaian dan dapat dijadikan sebagai pedoman pengawasan dan penilaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik serta ingin mengetahui lebih dalam tentang:

“INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) SEBAGAI DASAR PERENCANAAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan informasi yang diuraikan pada bagian latar belakang, adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa saja indikator-indikator dalam penyusunan 3 pilar Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK)?
2. Bagaimana tahap pengukuran untuk mendapat nilai skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK)?
3. Apa kelebihan dan kekurangan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK) yang membandingkannya dengan indeks pengukuran dari lembaga lain?
4. Apa harapan yang ingin dicapai dari penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK) khususnya di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui indikator-indikator yang menjadi penyusun tiga pilar Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK).
2. Mengetahui tahapan pengukuran untuk mendapat nilai skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK).
3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan yang membandingkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK) dengan indeks pengukuran dari lembaga lainnya.
4. Mengetahui harapan yang ingin dicapai dari penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK).

1.4 Manfaat Magang

Magang yang dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penulisan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai masukan dan sumber data serta informasi khususnya mengenai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK) sebagai dasar perencanaan strategi pemberantasan korupsi agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

2. Bagi praktisi

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan(APIP) baik di BPKP maupun inspektorat pengawasan lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap aparat pengguna APBD.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Bypass KM 14 Aie Pacah, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang. Lokasi dan jangka waktu dalam pelaksanaan magang sangat berpengaruh dalam mendukung penulis untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baik secara praktik dan teori di lapangan. Maka pelaksanaan magang berpedoman pada topik dari judul tugas akhir yang diambil yakni “Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK) Sebagai Dasar Perencanaan Strategi Pemberantasan Korupsi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat” selama 40(empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran bagaimana Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi(IEPK) sebagai dasar perencanaan strategi pemberantasan korupsi isi dari laporan akhir ini, maka penulis menyusun laporan ini yang dikelompokkan kedalam lima bab dimana setiap bab memuat sub-sub unsur yang saling berkaitan dan membentuk kerangka pembahasan yang padu dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan dari penulisan tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas sub judul secara teoritis yang berisikan tentang definisi korupsi, faktor-faktor penyebab meningkatnya korupsi, pengertian strategi pemberantasan korupsi, pengertian penerapan, pengertian indeks, pengertian efektivitas, pengertian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan tujuan dan manfaat IEPK.

BAB III GAMBARAN UMUM ATAU PROFIL BPKP

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yakni sejarah Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta produk dan layanan perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian penulis selama kegiatan magang di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera barat yang berkaitan tentang Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai dasar perencanaan strategi pemberantasan korupsi khususnya di Provinsi Sumatra Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pelaksanaan magang yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

